

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan entitas Akuntabilitas Kinerja berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul yang menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas praktek perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diwajibkan mengkonsumsi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Sedangkan Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standart Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 697).
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2021.
18. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800/37/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Bidang Kewenangan

Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Pejabat Struktural Eselon II A) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dibantu oleh :

- ❖ Sekretaris Dinas
- ❖ Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- ❖ Kepala Bidang Keluarga Berencana
- ❖ Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- ❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ❖ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- ❖ Kelompok Pejabat Fungsional

F. Gambaran Umum

1. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memenuhi jumlah, mutu dan penyebaran petugas lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan-kegiatan dalam sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa perencanaan, kebutuhan tenaga (petugas), peningkatan kemampuan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan tenaga Keluarga Berencana.

Sumber Daya Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Sebagai berikut :

No.	Pegawai	L	P	JUMLAH
1	PNS	14	28	42
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	1	1
4	Honor Provinsi (PLKB)	-	-	-
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	5	19	24
Jumlah		19	42	67

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	4	5	9
2	Sarjana (S-1)	16	13	29
3	Sarjana Muda / D3	1	12	13
4	D-1 / D-2	-	-	-
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	12	15
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-	1	1
Jumlah		24	43	67

3. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	2	2	4
2	Golongan III	7	23	30
3	Golongan II	1	7	8
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		10	32	42

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat	L	P	JUMLAH
1	ADUMLA / DIKLAT PIM IV	-	-	-
2	SPAMA / DIKLAT PIM III	1	1	2
3	DIKLAT PIM II	1	-	1
Jumlah		2	1	3

5. Berdasarkan Eselon dan Non Eselon

No.	Eselon	L	P	JLH	Non Eselon	L	P	JLH
1	Eselon II	-	1	1	Pelaksana	10	16	26
2	Eselon III	1	3	4	Entry Data/Pengemudi	5	19	24
3	Eselon IV	3	8	11	Petugas Kebersihan	-	1	1
Jumlah		4	12	16	Jumlah	15	26	51

6. Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PPLKB)

No.	Kecamatan	L	P	JUMLAH
1	Batang Angkola	-	1	1
2	Sipirok	-	2	2
3	Sipirok Dolok Hole	-	1	1
4	Angkola Timur	-	4	4
5	Angkola Barat	-	2	2
6	Angkola Selatan	1	2	3
7	Marancar	-	1	1
8	Batang Toru	-	2	2
9	Sayur Matinggi	1	-	1
10	Arse	1	1	2
11	Muara Batang Toru	1	0	1
12	Aek Bilah	-	-	-
13	Angkola Sangkunur	-	1	1
14	Tantom Angkola	-	1	1
15	Angkola Muaratais	-	3	3
Jumlah		4	21	25

2. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Gedung Tempat Kerja	16 Unit
2	Kendaraan Roda 4	7 Unit
3	Kendaraan Roda 2	74 Unit
4	Meja	57 Buah
5	Kursi	100 Buah
6	Laptop	13 Unit
7	Personal Computer (PC)	10 Unit
8	Proyektor	15 Unit
9	Telephon Mobil (Smartphon)	14 Unit
10	Smart TV	4 Unit
Jumlah		307 Unit

Sasaran hasil Program pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah meningkatnya kesadaran dan mutu sumber daya manusia serta perwujudan keluarga yang berkualitas.

3. Isu-Isu Strategis

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2010 - 2020 masih tinggi yaitu mencapai 1,28 % sedangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 2010 – 2020 mencapai 0,45 %, kemudian pada tahun 2021 mencapai 0,67 % yang dikhawatirkan penduduk tersebut tidak berkualitas yang kebanyakan di daerah-daerah miskin, terpencil, padat penduduk dan kampung-kampung nelayan yang jauh dari puskesmas atau klinik KB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa salah satu yang menjadi faktor dominan penyebab Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk yang kebanyakan di daerah-daerah miskin yang terpencil serta jauh dari puskesmas/klinik KB dan padat penduduk.

Permasalahan kependudukan di atas tentunya akan berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi dari aspek kuantitas penduduk berdampak pada pembangunan antara lain, (a) ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi (pangan, sandang, papan), (b) pembangunan berpusat pada daerah padat penduduk sehingga terjadi kesenjangan sosial, (c) munculnya pemukiman kumuh, sehingga ada kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, (d) banyaknya pengangguran dan munculnya kriminal.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap V Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 yaitu : ***“Tapanuli Selatan yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya”***.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.

Untuk mendukung Visi Bupati Tapanuli Selatan dalam RPJMD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Maka dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk Misi ke-1 yaitu ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)*** juga mempunyai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja (Renja).

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
				2	Persentase Peserta KB Aktif

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasinya upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi terhadap LAKIP Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

N O	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	KE T
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,56	
		2. Persentase Peserta KB Aktif	%	24,30	

C. Ringkasan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2021 (diluar rutin) sebanyak 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan (Daftar Terlampir)

N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.	Persentase Peserta KB Aktif			a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
				2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				b. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

D. Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan pagu Rp. 10.503.983.517,-dan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) (Daftar Terlampir)

E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada daftar di bawah ini :

No	SasaranStrategis	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Cakupan Kesertaan ber-KB	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (Persen)	1,56%
		2. Persentase Peserta KB Aktif (Persen)	24,30 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Awal	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.592.673.795,-	Rp. 4.792.217.517,-	P.APBD
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 5.711.766.000,-	Rp. 5.711.766.000,-	P. APBD
	Total	Rp. 10.304.439.795,-	Rp. 10.503.983.517,-	

Sipirok, 3 Desember 2021
Pihak Pertama,

AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada Tahun 2021.

$$Pencapaian\ kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

Untuk indikator “persentase laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata jumlah anak per keluarga” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$Pencapaian\ kinerja = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	90 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2021 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,56	0,67	157,05
	2	Persentase Peserta KB Aktif	%	24,30	26,16	107,65
Rata-Rata Capaian						132,35

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Utama dari dua indikator yang mendukung satu sasaran strategis tersebut kedua-duanya melebihi target

indikator kinerja sasaran, maka secara umum rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan adalah 132,35 persen dengan kategori Sangat Memuaskan.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
			2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,59	0,67	162,66	157,05
	2	Persentase Peserta KB Aktif	23,41	26,16	96,34	107,65
Rata-Rata Capaian			12,00	13,42	129,50	132,35

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 - 2021 dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATU AN	TARGET 2016 - 2021						REALISASI 2016 - 2021					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,92	0,91	1,63	1,61	1,58	1,56	0,66	0,91	0,60	0,39	0,59	0,67
	2	Persentase Peserta KB Aktif	%	21,19	21,70	22,30	23,50	24,30	24,30	21,19	21,70	22,30	23,50	23,41	26,16
Rata-Rata Capaian				11,06	11,31	11,97	12,56	12,94	12,93	10,93	11,31	11,50	11,95	12,00	13,42

Jika melihat perbandingan Rata-Rata Capaian pada 2 indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 yang terdapat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan, maka secara umum 2 indikator tersebut sudah terealisasi melebihi target 2021.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 ini, kedua sasaran kinerja melebihi hingga 100%, oleh karena itu secara umum rata-rata capaian kedua sasaran kinerja ini mencapai diatas 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori Sangat Tinggi. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja dari dua sasaran yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI (RUMUS)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56 %	0,67 (Jumlah Penduduk Tahun 2021) $Pencapaian\ Kinerja = \frac{315.021}{312.924} \times 100$ (Jumlah Penduduk Tahun 2020)	157,05

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Bila dilihat capaian kinerja pada indikator di atas, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020, yaitu dari 162,66 persen pada tahun 2020 berhasil diturunkan menjadi 157,05 persen pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 96,05 persen. Oleh karena itu Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan, artinya dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dikarenakan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan serta didukung potensi yang dapat dikembangkan melalui program/kegiatan di “Kampung KB” yaitu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi program Bangga Kencana di lini lapangan.

Keberhasilan Laju Pertumbuhan Penduduk ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
- b. Adanya rapat evaluasi setiap triwulan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- c. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial media terkait pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PLKB/PKB Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung beberapa pengembangan kampung KB.
- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari BKKBN RI, seperti kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, dll

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.673.231.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.110.661.250,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 90,08% yang diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Advokasi dan KIE, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, dll



2. Persentase Peserta KB Aktif

Adapun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Tahun 2021
1	Batang Angkola	758
2	Sayur Matinggi	602
3	Angkola Timur	1.201
4	Angkola Selatan	1.222
5	Angkola Barat	1.246
6	Batang Toru	1.223
7	Marancar	471
8	Sipirok	1.405
9	Arse	963
10	Saipar Dolok Hole	684
11	Aek Bilah	279
12	Muara Batang Toru	625
13	Tano Tombangan Angkola	824
14	Angkola Sangkunur	712
15	Angkola Muara Tais	393
Jumlah		12.608

Sumber Data : Dinas PPKB Kab. Tapsel

Dari data Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2021 di atas, maka capaian indikator persentase Peserta KB Aktif yang semula ditargetkan 96,34 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 107,65 persen pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 111,74 persen, artinya masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) mulai sadar bahwa dengan memakai Alat Kontrasepsi terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sangat berguna dalam rangka menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI (RUMUS)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	2. Persentase Peserta KB Aktif	24,30	<p>26,16</p> <p>(Jumlah Peserta KB Aktif)</p> $Pencapaian\ Kinerja = \frac{12.608}{48.191} \times 100$ <p>(Jumlah PUS)</p>	107,65

Sumber Data : Dinas PPKB Kab. Tapsel

Keberhasilan Persentase Peserta KB Aktif ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
- b. Adanya rapat evaluasi setiap triwulan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- c. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial media terkait pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PLKB/PKB Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung beberapa pengembangan kampung KB.
- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari BKKBN RI, seperti kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, dll

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 38.535.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 38.415.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 99,69% yang diarahkan untuk keberhasilan Persentase Peserta KB Aktif. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Advokasi dan KIE, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, dll



5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2021

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Efisiensi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 9.583.180.604,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 10.503.983.517. dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 8,77. Persentase efisiensi ini secara teori adalah kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun kalau dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang persentase efisiensinya mencapai 9,92%, hal ini dikarenakan adanya pandemik covid 19.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5.1. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 program dan 3 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

❖ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.711.766.00,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.149.076.250,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 90,15% yang diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sapiro, dll.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.503.983.517,- anggaran tersebut terdiri atas belanja tidak langsung dan sebesar Rp. 3.637.449.517,- dan belanja langsung sebesar 6.866.534.000,- untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

N O	URAIAN	ANGGARAN BELANJA Rp.	RELAISASI BELANJA Rp.	%
		2021	2021	2021
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.792.217.517	4.434.104.354	92,53
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.637.449.517	3.345.940.263	91,99
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00
	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.000.000	20.836.800	99,22
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.500.000	7.336.800	97,82
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.300.000	12.300.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.000.000	22.923.500	99,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.200.000	70.200.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	157.000.000	156.740.933	99,83
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	24.354.160	22.033.100	90,47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	751.813.840	688.206.713	91,54
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	81.000.000	80.986.245	99,98
B	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.711.766.000	5.149.076.250	90,15
1	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	5.673.231.000	5.110.661.250	90,08
2	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	8.535.000	8.495.000	99,53
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.000.000	29.920.000	99,73
	Total	10.503.983.517	9.583.180.604	91,23

Adapun untuk anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan begitu juga perhatian pemerintah terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memiliki arti penting dikarenakan tekanan terhadap program Bangga Kencana akan semakin besar setiap tahunnya, sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan program Bangga Kencana maka laju pertumbuhan penduduk akan semakin menurun nantinya. Peningkatan program itu tentunya dapat dicapai bila didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Namun secara umum alokasi belanja langsung untuk kegiatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020.

Jumlah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

N O	TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2016	3.654.830.988	4.323.770.200	7.978.601.188
2	2017	3.619.605.961	4.346.115.600	7.965.721.561
3	2018	2.553.242.963	2.626.008.925	9.246.762.963
4	2019	4.438.952.231	8.604.694.080	13.043.646.311
5	2020	3.382.670.054	7.055.033.000	10.437.703.054
6	2021	3.637.449.517	6.866.534.000	10.503.983.517

Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

NO	TAHUN	TARGET		REALISASI		%	SISA ANGGARAN
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
1	2016	3.654.830.988	4.323.770.200	3.563.541.391	4.241.044.384	98,09	82.725.816
2	2017	3.619.605.961	4.346.115.600	3.420.289.440	4.244.303.719	97,66	101.811.881
3	2018	2.553.242.963	6.693.520.000	2.626.008.925	6.576.905.215	98,26	116.614.785
4	2019	4.438.952.231	8.604.694.080	3.310.951.918	7.678.579.479	89,24	926.114.601
5	2020	3.382.670.054	7.055.033.000	3.293.008.506	5.194.461.884	81,32	1.950.232.664
6	2021	3.637.449.517	6.866.534.000	3.345.940.263	6.237.240.341	91,23	920.802.913

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase penyerapan anggaran dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dalam dua tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan. Meskipun realisasi secara umum masih berada pada 92,63%. Walaupun untuk sisa anggaran (silpa) masih terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terlambatnya juknis pada kegiatan operasional penyuluhan keluarga berencana (BOKB) dan adanya pandemic covid 19 sehingga terjadi pengurangan peserta dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelayanan.

Adapun pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir di bawah ini :

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Kinerja		Pagu	Anggaran		Tingkat Efisiensi
				Realisasi	%		Realisasi	%	
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Keluarga Berencana	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56	0,67	157,05	10.503.983.517	9.583.180.604	91,23	79,02
		2. Persentase Peserta KB Aktif	24,30	26,16	107,65				
		Rata-Rata			170,25				

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berawal dari Visi dan Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan serta kebijakan dan Program kegiatan dan juga pelaksanaan Program/kegiatan, maka dari hasil evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rata-Rata Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 pada 2 indikator mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu dari rata-rata capaian kinerja 129,50 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi rata-rata capaian kinerja 132,35 persen pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 102,20 persen.
2. Program/Kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mana program/kegiatan tersebut tingkat capaiannya adalah 91,23%.

B. Saran

Dalam rangka Peningkatan Kinerja yang Akuntabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan maka perlu saran sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang pendanaannya ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Selatan perlu ditingkatkan dalam rangka memberhasilkan Program Bangga Kencana sebagai dana Sharing kegiatan yang dibiayai APBN.
2. Perlu penambahan personil, Peningkatan Insentif Kader dan Petugas KB serta peningkatan status Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan karena luasnya jangkauan wilayah Pembinaan.
3. Perlu peningkatan Kualitas Perencanaan Program agar Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan sebelumnya.
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama antar stakeholder/mitra kerja dalam peningkatan program Bangga Kencana.

4. Perlu Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan bagi Kader dan Petugas KB dalam Peningkatan kualitas data, Pencatatan dan Pelaporan serta Pelayanan KB.

Sipirok, 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KAB. TAPANULI SELATAN,**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Bidang Kewenangan.....	3
E. Struktur Organisasi.....	4
F. Gambaran Umum	4
a. Sumber Daya Aparatur.....	6
b. Sarana dan Prasarana.....	6
c. Isu-Isu Strategis.....	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	9
D. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).....	9
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 11
A. Pengukuran Kinerja.....	11
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021.....	11
2. Membandingkan antara Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2020.....	12
3. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2021 dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah.....	12
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	12
5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021....	16
B. Akuntabilitas Keuangan.....	17
 BAB IV PENUTUP.....	 19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19

**RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

No	Kode					Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
1	1	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	1	14	01	2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Tapsel	100%	3,637,449,517	DAU
	1	14	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	12 Bulan	3,000,000	DAU
	1	14	01	2.02	06		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tapsel	6 Dok	21,000,000	DAU
	1	14	01	2.02	07		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapsel	2 Lap	7,500,000	DAU
	1	14	01	2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	41 Stel	12,300,000	DAU
	1	14	01	2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	12 Bulan	3,000,000	DAU
	1	14	01	2.06	05		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	12 Bulan	23,000,000	DAU
	1	14	01	2.06	06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapsel	12 Bulan	70,200,000	DAU
	1	14	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	233 OH	157,000,000	DAU
	1	14	01	2.08			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	1	14	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 Lbr	600,000	DAU
	1	14	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Tapsel	12 Bln	24,354,160	DAU
	1	14	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	100%	751,813,840	DAU
	1	14	01	2.09			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	1	14	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Tapsel	7 Unit	81,000,000	DAU

1	2					3	4	5	6	7	8
2	1	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	1	14	03	2.02			PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)				
	1	14	03	2.02	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Tapsel	25 Org	5,673,231,000	DAU/DAK
	1	14	03	2.03			PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1	14	03	2.03	05		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Tapsel	1500 Org	8,535,000	DAU
	1	14	03	2.03	11		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Tapsel	1500 Org	30,000,000	DAU
						J U M L A H				10,503,983,517	

**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2021**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	I	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	3,637,449,517	DAU
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	3,000,000	DAU
		3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dok	21,000,000	DAU
		4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan	2 Lap	7,500,000	DAU
		II	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 Stel	12,300,000	DAU
		III	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
		1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	3,000,000	DAU
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	23,000,000	DAU
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	70,200,000	DAU
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	233 OH	157,000,000	DAU
		IV	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Lbr	600,000	DAU
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bln	24,354,160	DAU
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	751,813,840	DAU
		V	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	7 Unit	81,000,000	DAU
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
		VI	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)			
		1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	25 Org	5,673,231,000	DAU/DAK

1	2	3		4	5	6
		VII	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1500 Org	8,535,000	DAU
		2	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1500 Org	30,000,000	DAU
		J U M L A H			10,503,983,517	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

TAHUN 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

No	Kode					Program	Lokasi	Target Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7
1	1	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1	14	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Tapsel	100%	3,637,449,517	DAU
	1	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	12 Bulan	3,000,000	DAU
	1	14	01	2.02	06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tapsel	6 Dok	21,000,000	DAU
	1	14	01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapsel	2 Lap	7,500,000	DAU
	1	14	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT				
	1	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	41 Stel	12,300,000	DAU
	1	14	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	12 Bulan	3,000,000	DAU
	1	14	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	12 Bulan	23,000,000	DAU
	1	14	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tapsel	12 Bulan	70,200,000	DAU
	1	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	233 OH	157,000,000	DAU
	1	14	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	1	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapsel	100 Lbr	600,000	DAU
	1	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Tapsel	12 Bln	24,354,160	DAU
	1	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	100%	751,813,840	DAU
	1	14	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	1	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Tapsel	7 Unit	81,000,000	DAU
2	1	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	1	14	03	2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)				
	1	14	03	2.02	02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Tapsel	25 Org	5,673,231,000	DAU/DAK
	1	14	03	2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Tapsel	1500 Org	8,535,000	
	1	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Tapsel	1500 Org	30,000,000	DAU
						J U M L A H			10,503,983,517	

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
TAHUN 2021**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

NO	Indikator Sasaran	Target Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	Realisasi Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	% Capaian Dari Target	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100.00	91.99	91.99	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	100.00	100.00	
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.00	99.22	99.22	
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	100.00	97.82	97.82	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	100.00	100.00	100.00	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00	99.67	99.67	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00	100.00	100.00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.00	99.83	99.83	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	100.00	100.00	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100.00	90.47	90.47	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00	91.54	91.54	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100.00	99.98	99.98	
14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100.00	90.08	90.08	
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.00	99.53	99.53	
16	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.00	99.73	99.73	

**PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
TAHUN 2021**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	97.35	97.35	91.99	91.99	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	0.00	100.00	100.00	
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	99.04	99.04	99.22	99.22	
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	100.00	100.00	97.82	97.82	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	100.00	100.00	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.24	86.24	99.67	99.67	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	100.00	100.00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	66.24	66.24	99.83	99.83	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	100.00	100.00	100.00	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	71.40	71.40	90.47	90.47	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.83	90.83	91.54	91.54	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	53.17	53.17	99.98	99.98	
14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	53.59	53.59	90.08	90.08	
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0.00	0.00	99.53	99.53	
16	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0.00	0.00	99.73	99.73	

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET CAPAIAN
KINERJA AKHIR TAHUN 2021 DALAM DOKUMEN RENCANA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target RKPD (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	97.35	97.35	91.99	91.99	100.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	99.04	99.04	99.22	99.22	100.00
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	100.00	100.00	97.82	97.82	100.00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.24	86.24	99.67	99.67	100.00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	100.00	100.00	100.00
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	66.24	66.24	99.83	99.83	100.00
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	71.40	71.40	90.47	90.47	100.00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.83	90.83	91.54	91.54	100.00
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	53.17	53.17	99.98	99.98	100.00
14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	53.59	53.59	90.08	90.08	100.00
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0.00	0.00	99.53	99.53	100.00
16	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0.00	0.00	99.73	99.73	100.00

**REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2021**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

NO	Sasaran Strategis	SKPD yang yang Melaksanakan Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dinas Dalduk dan KB	3,637,449,517	3,345,940,263	91.99
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Dalduk dan KB	3,000,000	3,000,000	100.00
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Dalduk dan KB	21,000,000	20,836,800	99.22
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Dalduk dan KB	7,500,000	7,336,800	97.82
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	12,300,000	12,300,000	100.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	3,000,000	3,000,000	100.00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dalduk dan KB	23,000,000	22,923,500	99.67
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Dalduk dan KB	70,200,000	70,200,000	100.00
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Dinas Dalduk dan KB	157,000,000	156,740,933	99.83
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	600,000	600,000	100.00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	24,354,160	22,033,100	90.47
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Dalduk dan KB	751,813,840	688,206,713	91.54
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dinas Dalduk dan KB	81,000,000	80,986,245	99.98
14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Dalduk dan KB	5,673,231,000	5,110,661,250	90.08
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	8,535,000	8,495,000	99.53
16	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas Dalduk dan KB	30,000,000	29,920,000	99.73
JUMLAH			10,503,983,517	9,583,180,604	91.23